

Kegagalan Re-Eleksi Petahana dan Batas-Batas *Incumbency advantage* pada Pemilu Legislatif Kota Medan 2024

Andika Syahputra Tj^{1*}, Indra Fauzan², Tonny Pangihutan Situmorang³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

*Corresponding Author's e-mail: sumutnewsdika@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1549 - 1558

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3027>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3027>

Article History:

Received: 24-06-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract : This study examines incumbency advantage in the 2024 Medan City Legislative Election, focusing on the low re-election rate of incumbent council members. Despite having access to publicly funded representative instruments, namely recess activities and local regulation socialization programs (sosper), only 19 of 50 members of the Medan City Council for the 2019-2024 term were re-elected. The study aims to identify factors behind incumbents' electoral defeat and explain the relationship between recess and sosper activities and voter behavior. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews with seven informants, consisting of three re-elected incumbents, three unsuccessful incumbents, and one academic. The analysis was guided by David R. Mayhew's incumbency advantage framework, including advertising, credit claiming, and position taking. The findings indicate that recess and sosper activities increased incumbents' political visibility and strengthened ties with constituents. However, re-election outcomes were more strongly influenced by money politics, weak follow-up of public aspirations, internal party vote fragmentation, and voter polarization during the 2024 Presidential Election.

Keywords : Incumbent Advantage, Failure to Win Re-election, Recess and Social Outreach, Vote-Buying, Legislative Elections.

Abstrak : Penelitian ini mengkaji fenomena *incumbency advantage* pada Pemilu Legislatif Kota Medan Tahun 2024 dengan fokus pada rendahnya tingkat keterpilihan kembali anggota DPRD petahana. Meskipun memiliki akses terhadap kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) yang didanai APBD, hanya 19 dari 50 anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 yang berhasil terpilih kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan petahana mempertahankan kursi serta menjelaskan hubungan antara aktivitas reses dan sosper dengan perilaku memilih masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri atas tiga petahana terpilih kembali, tiga petahana yang gagal terpilih, dan satu akademisi. Analisis dilakukan menggunakan teori *incumbency advantage* David R. Mayhew yang mencakup advertising, credit claiming, dan position taking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reses dan sosper meningkatkan visibilitas politik dan kedekatan petahana dengan konstituen. Namun, keterpilihan kembali lebih banyak dipengaruhi oleh praktik politik uang, lemahnya tindak lanjut aspirasi masyarakat, fragmentasi suara internal partai, serta polarisasi preferensi pemilih pada Pemilu Presiden 2024.

Kata Kunci : *Incumbency Advantage*, Kegagalan Re-eleksi, Reses dan Sosper, Politik Uang, Pemilu Legislatif.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme sentral dalam demokrasi perwakilan yang memberikan legitimasi kepada pejabat publik sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas elektoral.

Dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilih mencoblos langsung nama calon anggota legislatif, bukan sekadar logo partai, sehingga personalitas kandidat menjadi determinan utama keterpilihan. Mekanisme ini menciptakan arena kontestasi yang menonjolkan keunggulan personal, termasuk status petahana (*incumbency advantage*) yang menjadi sebuah konsep yang telah menjadi fokus ekstensif dalam literatur politik electoral (Carson *et al.*, 2020; Sevi, 2025).

Petahana merujuk pada individu yang sedang memegang jabatan politik dan kembali berkontestasi dalam pemilu berikutnya. Status ini memberikan keunggulan yang sulit diperoleh penantang, meliputi pengenalan nama yang lebih tinggi, akses sumber daya institusional, jaringan relasi yang telah terbangun, serta kemampuan menggalang dana kampanye yang lebih mudah (Martin *et al.*, 2024; Smrek, 2020). Di tingkat lokal, keunggulan paling substansial yang dimiliki anggota DPRD petahana adalah akses legal terhadap instrumen kebijakan yang didanai APBD, khususnya reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper). Kedua kegiatan ini secara rutin mempertemukan anggota dewan dengan konstituen tanpa membebani biaya personal kandidat, sehingga secara *de facto* berfungsi sebagai kampanye terselubung yang menguntungkan petahana.

Reses merupakan waktu khusus dalam agenda kerja DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat, dilaksanakan tiga kali setahun dengan pagu anggaran Rp122.838.945 per kegiatan per anggota dewan. Sementara sosper, yang dijadwalkan maksimal dua belas kali setahun dengan pagu Rp136.727.534 per kegiatan, bertujuan menyebarkan produk hukum daerah. Setiap kegiatan menghadirkan sekitar seribu warga yang menerima konsumsi, seminar kit, bahkan bingkisan. Secara kumulatif, selama satu periode jabatan, petahana berpotensi bertemu puluhan ribu konstituen tanpa mengeluarkan biaya pribadi yang menjadi sebuah keunggulan struktural yang tidak dapat disaingi penantang.

Kendati keunggulan institusional tersebut tampak *formidable*, bukti empiris menunjukkan bahwa *incumbency advantage* bukanlah fenomena universal maupun statis. Lee (2020) mendemonstrasikan bahwa di India, petahana justru cenderung merugi karena sentralisasi partai dan lemahnya otonomi legislatif menghambat pembangunan personal vote. Sevi (2025) menemukan bahwa keunggulan petahana di Kanada menurun drastis setelah reformasi surat suara tahun 1972 yang menambahkan afiliasi partai, menunjukkan bahwa efek personal petahana dapat tergerus oleh heuristik partisan. Agomor *et al.* (2020) bahkan mendokumentasikan peningkatan kekalahan petahana di Ghana akibat persepsi publik terhadap efektivitas tata kelola dan dinamika partai oposisi yang efektif. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keunggulan petahana bersifat kontekstual dan bergantung pada struktur kelembagaan, persepsi kinerja, serta perilaku pemilih (Ofosu, 2024; Walder *et al.*, 2025).

Di Indonesia, penelitian tentang *incumbency advantage* masih cenderung mengeksplorasi kasus-kasus kemenangan petahana dengan menekankan pada modal politik dan jaringan yang dimiliki. Galus *et al.* (2026) misalnya, mendokumentasikan bagaimana petahana Paulus Peos di Kabupaten Manggarai memanfaatkan visibilitas publik dan kedekatan sosial untuk mempertahankan kursinya. Namun, studi yang secara spesifik membongkar kegagalan petahana memanfaatkan keunggulan institusional terutama ketika instrumen reses dan sosper tersedia secara melimpah masih sangat terbatas. Padahal, kegagalan elektoral petahana dalam kondisi keunggulan struktural yang jelas justru membuka ruang analitis yang kaya untuk memahami mekanisme akuntabilitas elektoral dan rasionalitas pemilih di tingkat lokal (Adida *et al.*, 2020; Komarudin *et al.*, 2025).

Fenomena di DPRD Kota Medan pada Pemilu 2024 menyajikan anomali yang patut dicermati secara mendalam. Dari 50 anggota petahana yang kembali berkontestasi, hanya 19 yang

berhasil terpilih kembali, dimana dua di antaranya naik tingkat ke DPRD Sumut. Dengan kata lain, lebih dari 60 persen petahana gagal mempertahankan kursinya, meskipun memiliki akses penuh terhadap instrumen reses dan sosper yang didanai APBD. Angka ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa keunggulan institusional yang sedemikian besar tidak berkorelasi dengan keterpilihan kembali?

Beberapa faktor potensial dapat menjelaskan anomali ini. Pertama, kinerja legislatif yang dipersepsikan buruk oleh konstituen. Pemilih semakin kritis menilai hasil kerja wakil rakyat, terutama di era keterbukaan informasi dan masifnya penggunaan media sosial. Petahana yang dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, jarang hadir di dapil di luar kegiatan formal, atau tersangkut isu negatif cenderung kehilangan dukungan elektoral (Dewanti *et al.*, 2022). Kedua, munculnya penantang dengan strategi politik yang lebih adaptif, termasuk komunikasi digital yang responsif dan citra sebagai representasi perubahan. Ketiga, transformasi perilaku pemilih yang semakin mengarah pada personal vote berbasis kinerja ketimbang loyalitas partisan atau klientelistik (Agoraki *et al.*, 2022; Pramono *et al.*, 2026).

Yang tak kalah penting, efektivitas reses dan sosper sebagai instrumen mobilisasi dukungan patut dipertanyakan. Apakah kehadiran rutin dalam kegiatan-kegiatan ini benar-benar dikonversi menjadi dukungan elektoral, atau justru dipersepsikan sebagai seremonial belaka? Walder *et al.* (2025) menunjukkan bahwa di lima negara Eropa, kerja konstituensi (*constituency service*) merupakan faktor paling signifikan yang dihargai pemilih, melampaui efektivitas legislatif dan karakteristik personal. Namun, konversi ini mensyaratkan substansi, bukan sekadar kehadiran fisik. Jika kegiatan reses dan sosper tidak menghasilkan advokasi konkret atas permasalahan konstituen, maka nilainya sebagai modal elektoral dapat tergerus (Zeng *et al.*, 2025).

Mempertimbangkan kesenjangan literatur dan konteks empiris yang problematik, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan mendasar: (1) Mengapa petahana banyak yang tidak terpilih kembali pada Pemilu Legislatif Kota Medan Tahun 2024? (2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara aktivitas reses dan sosper dengan keterpilihan kembali petahana? Dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap lima daerah pemilihan di Kota Medan, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan re-eleksi petahana serta menguji secara empiris sejauh mana aktivitas reses dan sosper berkontribusi terhadap keterpilihan atau justru ketidakterpilihan kandidat petahana.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur *incumbency advantage* dalam konteks demokrasi lokal Indonesia yang masih kurang diteliti, khususnya dengan mengurai dimensi institusional dari keunggulan petahana yang kerap diasumsikan bekerja secara linear. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota legislatif petahana dalam merancang strategi representasi yang lebih substantif, sekaligus memberikan pemetaan taktis bagi penantang untuk menyusun kampanye yang kompetitif di tengah dominasi struktural petahana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan mayoritas anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 gagal terpilih kembali pada Pemilu 2024 meskipun memiliki akses terhadap instrumen reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) yang didanai APBD. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan strategi politik para aktor secara komprehensif dalam konteks alamiah penelitian (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2006).

Penelitian dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Medan yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas legislatif yang memudahkan akses terhadap informan serta dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, arsip kegiatan reses dan sosper yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan, dokumen kelembagaan DPRD, serta berbagai sumber media yang relevan dengan penelitian.

Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas tiga anggota DPRD Kota Medan petahana yang terpilih kembali pada Pemilu 2024, tiga anggota DPRD petahana yang gagal terpilih kembali, serta seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) merupakan anggota DPRD Kota Medan periode 2019–2024 yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024; (2) mewakili variasi hasil elektoral, baik terpilih kembali maupun tidak terpilih; dan (3) bersedia memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Nurdiani, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, strategi politik, dan persepsi informan terkait pemanfaatan reses dan sosper. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data hasil pemilu, regulasi, serta dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi representasi anggota DPRD. Sementara itu, observasi non-partisipan dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kegiatan reses dan sosper di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, serta pengecekan konsistensi informasi antar-informan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Patton, 2015).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data lapangan, kemudian menghubungkannya dengan konsep *incumbency advantage* dan *incumbency disadvantage* untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan petahana dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reses dan Sosialisasi Perda sebagai Instrumen *Incumbency Advantage*

Reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) merupakan dua instrumen institusional yang secara legal melekat pada jabatan anggota DPRD. Keduanya dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, serta diatur teknis dalam Peraturan DPRD Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Reses dilaksanakan tiga kali setahun di luar masa sidang, sementara sosper dijadwalkan maksimal dua belas kali setahun. Setiap kegiatan menghadirkan sekitar seribu warga dengan pendanaan penuh dari APBD Kota Medan, mencakup konsumsi, seminar kit, hingga bingkisan. Secara kumulatif, seorang petahana dapat bertemu sekitar 15.000 konstituen per tahun tanpa mengeluarkan biaya personal.

Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa instrumen ini berfungsi sebagai *incumbency advantage* yang secara struktural menciptakan ketimpangan kompetitif antara petahana dan

penantang. Kemampuan finansial dan elektabilitas yang seharusnya dibangun dengan sumber daya pribadi telah disubstitusi oleh negara melalui alokasi APBD. Sebagaimana ditegaskan Martin *et al.* (2024), sumber daya legislatif memang dapat meningkatkan keunggulan petahana, namun efeknya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan persepsi publik. Dalam kasus DPRD Medan, akses terhadap sumber daya ini memberikan panggung promosi diri yang masif dan nyaris tanpa biaya.

Rajuddin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan yang terpilih kembali untuk periode ketiga dengan suara terbanyak se-Kota Medan (17.852 suara), menegaskan bahwa keuntungan petahana yang paling menentukan bukan sekadar kehadiran dalam reses dan sosper, melainkan kemampuan mengadvokasi usulan masyarakat hingga terealisasi sebagai kebijakan:

“Itu memang andalan saya, mengadvokasi usulan masyarakat sehingga usulan masyarakat 97% saya masukkan ke dalam advokasi dan berhasil 97%. Biasanya usulan itu bermacam seperti perbaikan infrastruktur kayak aspal jalan, drainase, lampu mati atau tidak ada tiang, kemudian bansos.”

Pola ini merefleksikan mekanisme credit claiming yang dikemukakan Mayhew (1974), di mana petahana mengklaim keberhasilan program pemerintah sebagai kontribusi personalnya. Temuan ini juga selaras dengan Galus *et al.* (2026) yang mendokumentasikan bagaimana petahana Paulus Peos memanfaatkan visibilitas publik dan bantuan sosial sebagai instrumen pengenalan nama. Namun, kasus Rajuddin menunjukkan bahwa efektivitas credit claiming sangat bergantung pada bukti konkret realisasi aspirasi, bukan sekadar seremoni kehadiran. Sejalan dengan itu, Ofosu (2024) menemukan bahwa pemilih di Ghana lebih menghargai aktivitas representasi politik yang berorientasi pada barang publik dibandingkan layanan konstituen yang bersifat privat, mengindikasikan bahwa preferensi pemilih terhadap kinerja substantif bersifat lintas konteks.

Di sisi lain, Mulia Syahputra Nasution, petahana dari Partai Gerindra yang gagal terpilih kembali, mengaku telah merealisasikan sekitar 60% usulan masyarakat dan bahkan melayani keluhan warga hingga dini hari. Namun, upaya tersebut tidak berkorelasi dengan keterpilihan:

“Hampir 60% (usulan masyarakat) itu berhasil direalisasikan. Saya itu sampai jam 1-2 pagi tempat menerima keluhan dan masyarakat. Kalau butuh akses mau ketemu lurah dan camat, saya telepon langsung datang. Makanya kita nggak tahu, tapi pasti money politics.”

Kontradiksi antara Rajuddin dan Mulia Syahputra memperlihatkan bahwa realisasi aspirasi tidak secara otomatis menjamin keterpilihan kembali ketika berhadapan dengan faktor eksternal seperti politik uang dan efek ekor jas (*coattail effect*) Pilpres. Temuan ini memperkuat argumen Adida *et al.* (2020) bahwa informasi tentang kinerja legislatif hanya memengaruhi perilaku pemilih jika dua kondisi terpenuhi: relevansi isu bagi kesejahteraan pemilih dan persepsi bahwa pemilih lain juga bertindak berdasarkan informasi tersebut. Dalam kasus Mulia Syahputra, masifnya politik uang menciptakan gangguan terhadap mekanisme akuntabilitas elektoral berbasis kinerja.

Mulia Asri Rambe, petahana dua periode dari Partai Golkar yang juga gagal terpilih, justru mengalami peningkatan suara signifikan dari 6.886 (2019) menjadi 8.986 (2024), meskipun basis suaranya di Kecamatan Medan Deli bergeser ke dapil III akibat perubahan daerah pemilihan. Ia mengakui keuntungan petahana sangat berpengaruh terhadap penambahan suara secara personal:

“Ya berpengaruh (keuntungan petahana untuk menambah suara). Buktinya suara naik 100 persen, secara pribadi sangat berpengaruh. Kalau dikasi begitu kegiatannya, suara tak meningkat kebangetan.”

Namun, peningkatan suara personal tidak cukup ketika akumulasi suara partai tidak terdongkrak. Sistem Sainte-Laguë yang diterapkan KPU, ditambah dengan perubahan dapil,

membuat suara individu tidak serta-merta menjamin keterpilihan jika perolehan partai secara keseluruhan tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi. Temuan ini mengonfirmasi argumen Lee (2020) bahwa di sistem yang tersentralisasi pada partai, keunggulan petahana sangat bergantung pada struktur kelembagaan yang memberikan otonomi dan kapasitas membangun personal vote. Sistem proporsional terbuka di Indonesia memang memungkinkan personal vote, namun metode konversi kursi tetap membatasi efektivitasnya ketika suara partai terfragmentasi.

Popularitas dan Mekanisme Mobilisasi Dukungan

Popularitas merupakan modal fundamental dalam kontestasi elektoral, dan reses serta sosper berfungsi sebagai panggung pelebagaan popularitas petahana (Nimmo, 1978). Ihwan Ritonga, mantan Wakil Ketua DPRD Medan yang berhasil naik kelas menjadi anggota DPRD Sumut pada Pemilu 2024, memanfaatkan kegiatan sosper dan reses untuk memperluas jangkauan ke wilayah baru di luar basis dapil lamanya:

“Sangat bermanfaat sekali, itu memang kita lakukan, reses kemudian sosper, pada saat kegiatan itulah kita memanfaatkan ajang silaturahmi dengan masyarakat dan konstituen. Walaupun acaranya sosper, masyarakat ini ujung-ujungnya minta tolong, minta bantuan.”

Menjelang pemungutan suara, Ihwan bahkan menggunakan dana pribadi untuk menambah kapasitas peserta sosper dari 500 menjadi 2.000 orang, sembari tetap memberikan bingkisan. Strategi ini mendemonstrasikan bagaimana petahana mengombinasikan sumber daya negara dan sumber daya pribadi untuk memaksimalkan keunggulan elektoral. Praktik ini selaras dengan temuan A'rof *et al.* (2025) bahwa petahana perempuan di Kota Tegal mengeluarkan dana pribadi hingga Rp 2 miliar selama masa pra-kampanye hingga kampanye untuk mempertahankan kursinya. Pola serupa juga ditemukan Arzila *et al.* (2025) di mana anggota legislatif PKB mengombinasikan bonding, bridging, dan linking social capital untuk memenangkan kontestasi.

Pemberian bingkisan dalam kegiatan reses dan sosper menempati posisi ambigu: secara legal merupakan bagian dari paket kegiatan yang dianggarkan APBD, namun secara persepsi publik dapat dipandang sebagai bentuk politik uang terselubung. Ihwan sendiri mengakui bahwa kehadiran masyarakat sangat bergantung pada ekspektasi menerima bingkisan:

“Karena tidak mungkin masyarakat mau datang kalau tak ada bingkisan.”

Temuan ini mengonfirmasi argumen Komarudin *et al.* (2025) bahwa politik uang telah menjadi faktor dominan dalam membentuk perilaku pemilih di Indonesia, di mana 69,75% responden di Kabupaten Subang mengaku dipengaruhi oleh praktik tersebut dalam menentukan pilihan. Normalisasi politik uang menciptakan arena kontestasi yang semakin transaksional, menggerus efektivitas pendekatan berbasis kinerja yang dibangun petahana melalui reses dan sosper.

Faktor-Faktor Kekalahan Petahana

Temuan lapangan mengidentifikasi beberapa faktor yang secara simultan berkontribusi terhadap kegagalan re-eleksi mayoritas petahana DPRD Medan pada Pemilu 2024. Pertama, politik uang dan serangan fajar yang dilakukan penantang secara masif, terutama di daerah pemilihan dengan karakteristik pemilih berpenghasilan rendah. Hendra DS, petahana dua periode dari Partai Hanura yang gagal terpilih, mengungkapkan bahwa rata-rata caleg di dapil IV menyiapkan dana sekitar Rp 4 miliar untuk kampanye. Ia mengakui bahwa bantuan rutin melalui reses dan sosper hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap elektabilitas:

“Faktor terbesar itu uang, pemberian di akhir. Kalau bantuan itu rutin dibuat. Reses dan sosper kita sering bagi beras, ada pengaruh tapi tak signifikan hanya 20%.”

Kedua, fragmentasi suara internal partai akibat lemahnya kerja kolektif caleg dalam satu partai. Hendra DS mencatat bahwa pada Pemilu 2019, caleg di bawahnya mampu mendongkrak akumulasi suara partai, sementara pada Pemilu 2024 suara caleg internal Hanura di dapil yang sama hanya sekitar 100 suara. Ketiga, perubahan daerah pemilihan yang menggeser basis suara petahana, sebagaimana dialami Mulia Asri Rambe yang kehilangan sekitar 2.300 suara dari Kecamatan Medan Deli. Keempat, efek ekor jas Pilpres yang memengaruhi preferensi pemilih, khususnya di kalangan pemilih Muslim, sebagaimana diutarakan Mulia Syahputra:

“Faktor irisan Pilpres, ini mempengaruhi pada waktu itu dan besar pengaruhnya terkhusus di kelompok Islam.”

Kelima, persaingan internal partai yang tinggi dengan penantang yang memiliki modal finansial besar dan bergerak secara agresif di luar instrumen formal negara. Temuan ini memperkaya analisis Dewanti *et al.* (2022) yang mendokumentasikan bagaimana kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) berupa politik uang dan kekuasaan terlihat (*visible power*) berupa strategi kampanye yang tidak terfokus dapat mengalahkan petahana, bahkan ketika perolehan suara personalnya meningkat.

Dari perspektif teoretis, fenomena kekalahan massif petahana di Kota Medan mengonfirmasi argumen Agomor *et al.* (2020) bahwa petahana tidak kebal terhadap kekalahan elektoral, dan keunggulan petahana dapat tergerus oleh persepsi publik terhadap efektivitas tata kelola, dinamika partai oposisi, serta manajemen pemilu primer yang buruk. Di Medan, faktor-faktor tersebut termanifestasi dalam bentuk politik uang, fragmentasi internal partai, dan ketidakmampuan petahana mengonversi kehadiran institusional menjadi loyalitas elektoral yang resisten terhadap godaan transaksional.

Analisis Teoretis: Batas-Batas *Incumbency Advantage*

Menggunakan kerangka tiga dimensi Mayhew (1974) *advertising*, *credit claiming*, dan *position taking* dapat dijelaskan mengapa sebagian petahana gagal mempertahankan kursinya. Pertama, *advertising* melalui reses dan sosper memang meningkatkan pengenalan nama, tetapi tidak serta-merta menciptakan preferensi elektoral yang kokoh. Sebagaimana ditunjukkan Sevi (2025), efek personal petahana dapat tergerus oleh heuristik lain yang lebih dominan, dalam konteks Medan berupa politik uang dan afiliasi partisan yang dipicu Pilpres.

Kedua, *credit claiming* hanya efektif jika pemilih mempersepsikan bahwa hasil pembangunan merupakan kontribusi personal petahana, bukan program rutin pemerintah. Rajuddin Sagala berhasil membangun persepsi ini melalui advokasi 97% usulan masyarakat, sementara petahana lain gagal menciptakan narasi serupa karena realisasi aspirasi yang tidak terkomunikasikan secara efektif atau tergerus oleh persepsi bahwa program tersebut adalah kerja kolektif pemerintah, bukan individu. Temuan ini memperkuat argumen Walder *et al.* (2025) bahwa kerja konstituensi merupakan faktor paling signifikan yang dihargai pemilih, namun dengan syarat terdapat komunikasi yang jelas tentang atribusi kinerja.

Ketiga, *position taking* hampir tidak muncul dalam temuan lapangan, mengindikasikan bahwa petahana di tingkat lokal lebih mengandalkan pendekatan distributif dan pelayanan konstituen ketimbang artikulasi sikap politik terhadap isu-isu strategis. Ketiadaan dimensi ini membuat hubungan petahana-konstituen bersifat transaksional dan rentan terhadap tawaran material yang lebih tinggi dari penantang.

Akhirnya, temuan ini mendukung argumen Smrek (2020) bahwa arena politik tidak netral gender maupun status petahana harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan output politik yang dihargai pemilih. Di Medan, kerja keras tersebut tidak cukup hanya melalui instrumen institusional, melainkan juga harus disertai kemampuan menghadapi realitas politik uang,

mengelola dinamika internal partai, dan membangun narasi personal yang membedakan petahana dari penantang. Kekalahan petahana secara massif di Kota Medan merupakan cerminan dari meningkatnya pragmatisme pemilih dan semakin transaksionalnya ekosistem politik lokal, sekaligus menegaskan bahwa *incumbency advantage* bersifat kontekstual dan tidak bekerja secara linear (Agomor *et al.*, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan kembali anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu 2024 hanya mencapai 38 persen atau 19 dari 50 petahana. Temuan ini mengindikasikan bahwa keunggulan petahana tidak secara otomatis menjamin keberhasilan re-eleksi dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Rendahnya tingkat keterpilihan kembali petahana dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, penerapan metode Sainte-Laguë menyebabkan perolehan suara individu tidak selalu berbanding lurus dengan peluang memperoleh kursi karena sangat bergantung pada akumulasi suara partai. Kedua, perubahan komposisi daerah pemilihan mengurangi stabilitas basis dukungan yang telah dibangun petahana selama masa jabatan. Ketiga, maraknya praktik politik uang menjelang pemungutan suara mengurangi efektivitas keunggulan institusional yang dimiliki petahana melalui kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa keunggulan petahana tetap dapat memberikan dampak positif apabila diikuti dengan advokasi aspirasi masyarakat yang nyata, komunikasi politik yang berkelanjutan, serta kedekatan sosial dengan konstituen. Dengan demikian, efektivitas *incumbency advantage* sangat bergantung pada kemampuan petahana mengubah akses institusional menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat, sekaligus beradaptasi terhadap dinamika elektoral dan persaingan politik yang berkembang.

Anggota DPRD petahana perlu memperkuat fungsi representasi, pengawasan, dan legislasi secara substantif serta memastikan setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan sosialisasi peraturan daerah ditindaklanjuti secara nyata. Komunikasi politik juga perlu dilakukan secara lebih terbuka melalui kombinasi interaksi langsung dan pemanfaatan media digital agar capaian kinerja dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

Pelaksanaan reses dan sosialisasi peraturan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang konkret dan terukur bagi masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas representasi politik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pengaruh sistem konversi suara, peran media sosial, dan praktik politik uang terhadap keterpilihan kembali petahana pada berbagai daerah pemilihan. Penelitian komparatif antardaerah juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas *incumbency advantage* dalam konteks politik lokal di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, terhadap pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang mendalam selama proses pengumpulan data, yaitu Rajuddin Sagala, Bahrumsyah, Ihwan Ritonga, Hendra DS, Mulia Asri Rambe, Mulia Syahputra Nasution, dan Arifin Saleh Siregar. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah menyediakan akses terhadap dokumen dan data pendukung yang relevan, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Medan atas ketersediaan data rekapitulasi hasil Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- A'rof, A. B., Fitriyah, & Herawati, N. R. (2025). Modalitas Keterpilihan Petahana Perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 606–617.
- Adida, C., Gottlieb, J., Kramon, E., & McClendon, G. (2020). When Does Information Influence Voters? The Joint Importance of Salience and Coordination. *Comparative Political Studies*, 53(6), 851–891. <https://doi.org/10.1177/0010414019879945>
- Agomor, K. S., Adams, S., & Asante, W. (2020). Anatomy of Ghana's parliamentary elections and democratic consolidation. *Journal of Contemporary African Studies*, 38(3), 399–414. <https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1774523>
- Agoraki, M.-E. K., Kouretas, G. P., & Laopodis, N. T. (2022). Geopolitical risks, uncertainty, and stock market performance. *Economic and Political Studies*, 10(3), 253–265. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2095749>
- Arzila, N., Suryanef, Rafni, A., & Dewi, S. F. (2025). Modal Sosial Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Pesisir Selatan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(5).
- Carson, J. L., Sievert, J., & Williamson, R. D. (2020). Nationalization and the Incumbency Advantage. *Political Research Quarterly*, 73(1), 156–168. <https://doi.org/10.1177/1065912919883696>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewanti, M., Al-Hamdi, R., & Efendi, D. (2022). Kekalahan Petahana pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 17–37. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a2>
- Galus, M. A. S., Benu, E. D. N. A., Triadmaja, S., & Tiran, R. (2026). Keunggulan Petahana dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Manggarai Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 100–114. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1535>
- Komarudin, U., Handoko, W., & Hussain, F. (2025). Money Politics and Voter Behavior: Factors Behind Incumbent Defeat in Subang Regency's 2024 Regional Election. *Jurnal Hukum*, 41(2), 216. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.44163>
- Lee, A. (2020). Incumbency, Parties, and Legislatures: Theory and Evidence from India. *Comparative Politics*, 52(2), 311–331. <https://doi.org/10.5129/001041520X15679432647751>
- Martin, S., McClean, C. T., & Strom, K. W. (2024). Legislative Resources, Corruption, and Incumbency. *British Journal of Political Science*, 54(2), 526–535. <https://doi.org/10.1017/S0007123423000108>
- Mayhew, D. R. (1974). *Congress: The Electoral Connection*. Yale University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. D. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Ofori, G. K. (2024). What do voters want from their legislators? evidence from Ghana. *African*

- Affairs*, 123(491), 165–192. <https://doi.org/10.1093/afraf/adae013>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pramono, W., Darmawan, S., Prayugo, A., & Budi Prayitno, R. (2026). Celebrity Politics dan Partisipasi Pemilih Muda: Studi Kasus Kemenangan Once Mekel Pada Pileg 2024. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 8(1), 14–21. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v8i1.397>
- Sevi, S. (2025). The Incumbency advantage in Canadian Elections. *Canadian Journal of Political Science*, 397–407. <https://doi.org/10.1017/S0008423925000058>
- Smrek, M. (2020). Do female legislators benefit from incumbency advantage? Incumbent renomination in a flexible-list PR system. *Electoral Studies*, 66(July), 102189. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102189>
- Walder, M., Bailer, S., & Giger, N. (2025). Does It Matter What You Do (Or Only Who You Are)? On the Effects of Parliamentarians' Behavior on Vote Choice. *Legislative Studies Quarterly*, 50(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/lsg.70044>
- Zeng, Y., He, J., & Lü, X. (2025). Constituency Service and Valence Voting in Semi-Competitive Elections: Theory and Evidence From China. *Political Studies*, 73(4), 1610–1631. <https://doi.org/10.1177/00323217241307177>